

**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI
PEMERINTAHAN DI KANTOR DESA LAMATTI RIATTANG KECAMATAN
BULUPODDO**

Khairul Insan¹, Sri Rahayu Juniati², Syamsiah Hasyim³ & Nursyafika⁴

¹ **Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: khaerulinsan46@gmail.com

² **Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: sriayu240320@gmail.com

³ **Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: syamsiah.hasyim@gmail.com

⁴ **Universitas Muhammadiyah Sinjai**

E-mail: nursyafika@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the implementation of good governance to improve the performance of government organizations in the Lamatti Riattang Village Office, Bulupoddo District. The research method used was qualitative descriptive research. Data collection through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were data collection, reduction, presentation, and conclusion.

The results indicated that the implementation of good governance in improving the performance of government organizations was good. Responsibility had been running well. Implementing government transparency in managing a village government budget refers to existing regulations. All village officials were given their respective authorities and they had carried them out with the SOP. There was no suggestion box, so if there was a complaint, the public could directly contact the WhatsApp number for complaint service. The effectiveness was seen from the existence of a document stating the accountability of the village head in evaluating activities. All program implementations were carried out well because of community support. Every activity always involves the community. If the village government carried out a development, the community was enthusiastic to help. The success of the development of the village government program had been going well. This can be seen in the maintenance of concrete rebates. Administrative guidance for dasawisma carried out by PKK Lamatti Riattang. Procurement of arts and sports festivals at the hamlet level to commemorate the Republic of Indonesia's Independence Day. Development of waste bank management which aimed to give education to the community about the economic value of waste and made Lamatti Riattang village a waste-free village.

This research can guide the Village Government in improving the performance of government organizations at the Lamatti Riattang Village Office, Bulupoddo District.

Keywords: Implementation of good governance, Performance of government organizations

PENDAHULUAN

Administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Silalahi, 2013). Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau

Khairul Insan¹, Sri Rahayu Juniati², Syamsiah Hasyim³ & Nursyafika⁴

golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut (Usman, 2002), penerapan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut (Setiawan, 2024) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Governance merupakan kerangka konsep untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan agar memiliki kinerja tinggi (Duadji, 2013). *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa antara administrasi publik dan *good governance* memiliki kaitan yang cukup besar. Dimana untuk menjalankan sistem *good governance* sangat dibutuhkan tata administrasi yang sangat baik. Misalkan saja dalam menjalankan pemerintahan di desa tentunya kita kenal dengan istilah pelayanan publik seperti pengurusan berkas dan lain- lain tentunya ini menjadi pekerjaan untuk dalam cakupan ilmu administrasi public. *Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah dan aparatnya kepada masyarakat untuk menciptakan dan menciptakan kondisi bagi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pelayanan publik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Satu dari Inti dari pemerintahan yang baik adalah penciptaan produk layanan yang efektif, pemerintahan yang efisien dan akuntabel diarahkan pada masyarakat (Irfani et al., 2021). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009).

Pelayanan publik yang menerapkan *good governance* agar dapat dilaksanakan secara maksimal, maka dari itu diperlukan suatu kewajiban serta keikutsertaan semua pihak yang terdiri dari masyarakat serta pemerintah. (Iza et al., 2022) mengatakan bahwa *Good governance* yang efektif membutuhkan kerjasama yang baik, integritas, etos kerja, profesional dan moral yang tinggi. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan negara menjadi suatu tantangan tersendiri. Tujuan utama dalam pelayanan publik yaitu terselenggaranya *good governance* sebagai bentuk dalam mewujudkan suara dari masyarakat agar tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa dan Negara.

Selaras dengan pendapat (Tompo & Madani, 2021) dan (Daraba, 2015) bahwa pelayanan adalah tata cara untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara aktivitas secara langsung. Maka dari itu proses untuk mencapai tujuan utama dibutuhkan usaha dan menerapkan sistem yang dapat dipertanggung jawabkan dengan tepat, secara nyata dan jelas hingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat terlaksana dengan bertanggung jawab dan berhasil. Desa adalah tempat dimana adanya pelayanan, perwakilan pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik di tingkat desa yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kinerja operasional para pegawai menuntut adanya peningkatan pelayanan, hal tersebut disebabkan kinerja pegawai yang tinggi dapat menggambarkan kinerja operasional secara menyeluruh. Kesadaran terhadap tugas yang rendah harus dipertanggung jawabkan menjadi unsur pemicu mengapa tingkat kinerja dapat dinilai buruk. Sikap tanggap aparat yang acuh tak acuh kepada masyarakat mengenai pelayanan juga bermasalah. Sistem dan prosedur yang belum tertib serta pelayanan yang berbelit-belit sudah termasuk tidak sesuai dengan prinsip *good governance*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perbaikan mengenai kualitas dari pelayanan publik sehingga pelayanan publik yang prima dapat terwujud, upaya yang diperlukan salah satunya yaitu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penerapan prinsip *good governance* di Desa Lamatti Riattang walaupun secara umum telah berjalan dengan baik tetapi tetap masih ada kekurangan. Dalam hal ini adalah kurangnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa Lamatti Riattang sedangkan dengan penguasaan teknologi oleh pemerintah desa bertujuan agar sistem pelayanan publik menjadi semakin efektif dan efisien lagi kedepannya. Aparatur pelayanan publik di Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai sudah seharusnya mempersiapkan diri untuk menerapkan indikator Peran perangkat Desa dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini bertujuan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik serta agar kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan semakin meningkat. Penyelenggaraan pemerintah Desa seringkali kurang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dana Desa. Contohnya aparatur desa tidak mempublikasikan laporan keuangan desa secara berkala, sehingga masyarakat desa tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Berikut pendapatan Desa Lamatti Riattang Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut.

Khairul Insan¹, Sri Rahayu Juniati², Syamsiah Hasyim³ & Nursyafika⁴

Tabel 1. Pendapatan Desa Lamatti Riattang Dana Tahun 2024

No.	URAIAN	ANGGARAN
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp 3.000.000,00
2.	Alokasi Dana Desa(ADD)	Rp 744.241.317,00
3.	Dana Desa(DDS)	Rp 760.363.000,00
4.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi(BHP)	Rp 50.543.875,00
5.	Bunga Bank	Rp 6.156,786,00
Jumlah Pendapatan		Rp 1.564.304.978,00
Silpa Tahun Lalu		Rp 145.465.988,12

Sumber: Desa Lamatti Riattang, 2024

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi Pemerintahan Desa Lamatti Riattang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, persepsi, dan pengalaman para stakeholder terkait *good governance*. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi berbagai aspek, seperti faktor-faktor pendukung dan penghambat *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi, strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pelayanan publik, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, di mana seleksi narasumber dilakukan dengan sengaja untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran yang relevan dalam desa lamatti riattang. Narasumber utama meliputi: Kepala Desa Lamatti Riattang kecamatan Bulupoddo, Perangkat Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo dan Masyarakat Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo. Teknik analisis data interaktif dan tersusun secara sistematis yaitu Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan penelitian, penulis telah banyak mendapatkan masukan berupa data-data yang berkaitan dengan Penerapan *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemerintahan di Kantor Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo. Indikator-indikator yang digunakan Penerapan *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemerintahan di Kantor Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo sebagai berikut: 1) Responsibilitas, 2) Efektivitas, 3) Keberhasilan Pembangunan. Dari data-data yang penulis peroleh, akan penulis paparkan data yang berkaitan dengan pengolahan data kualitatif.

1. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan perangkat desa dalam mengidentifikasi keperluan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan menyusun rencana pelayanan publik yang dapat dilihat dari beberapa cara sebagai berikut: Adanya peluang dan wadah untuk saran dan pengaduan masyarakat, berkaitan dengan kebutuhan dan rencana pelayanan serta Kapasitas respon desa dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat.

Menurut Kepala Desa Lamatti Riattang dalam wawancara mengatakan:

“Penerapan bagaimana bentuk transparansi pemerintah dalam hal ini apakah itu membuat sebuah kebijakan maupun didalam hal mengelola sebuah anggaran kami pada prinsipnya mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada, yang kedua semua perangkat desa atau pengelola yang ada dikantor desa kami memberikan kewenangannya masing- masing dalam mengolah kewenangannya dan menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing dan mengacu pada SOP yang ada begitu ada kebutuhan masyarakat teman-teman diperangkat desa melakukan identifikasi data pemeriksaan berkas utamanya nanti apabila setelah berkasnya lengkap maka itu bisa diproses lanjut. Hanya saja belum ada kotak saran dan pengaduan masyarakat tapi kami tetap menerima ketika ada pengaduan dari masyarakat terutama kebutuhan dan rencana pelayanan serta kami selalu respon dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat”.

Pemaparan kepala desa diatas menjelaskan bahwa penerapan transparansi pemerintah dalam hal ini apakah dengan membuat sebuah kebijakan maupun didalam hal mengelola sebuah anggaran pemerintah desa pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Semua perangkat desa atau pengelola yang ada dikantor desa diberikan kewenangannya masing- masing dalam mengolah kewenangannya dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP (data terlampir) dan kebutuhan masyarakat perangkat desa melakukan identifikasi data pemeriksaan berkas seperti: pengurusan surat tanah yang dilakukan dua orang atau lebih akan diutamakan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan nanti apabila setelah berkasnya lengkap maka bisa diproses lanjut. Hanya saja belum ada kotak saran dan pengaduan masyarakat tapi pemerintah desa tetap menerima ketika ada pengaduan dari masyarakat terutama kebutuhan dan rencana pelayanan serta pemerintah desa selalu respon dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat.

Adapun daftar jenis layanan di kantor Desa Lamatti Riattang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Layanan di Kantor Desa Lamatti Riattang

No.	Jenis Layanan	Bentuk Layanan
1.	Administratif	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (kelahiran, kematian, perkawinan dll)

Khairul Insan¹, Sri Rahayu Juniati², Syamsiah Hasyim³ & Nursyafika⁴

2.	Sosial	Pelayanan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pelayanan terkait Program Keluarga Harapan (PKH)
3.	Kesehatan	1. Posyandu Aktif 2. Penyuluhan Gizi dan Pola Hidup Sehat. 3. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita. 4. Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil. 5. Kampanye Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular. 6. Program Imunisasi Rutin. 7. Sarana Air Bersih dan Sanitasi.
4.	Pendidikan	Mulai dari pendidikan formal, nonformal, hingga informal, masuk dalam wadah layanan pendidikan desa.
5.	Infrastruktur	Pembangunan fasilitas jalan, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur desa terdiri dari pembangunan infrastruktur fisik dan pembangunan infrastruktur non-fisik

Sumber Data: Diolah dari Kantor Desa Lamatti Riattang, 2024

Tugas pemerintah kepada masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam layanan administratif, sosial, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dimana pemerintah memberikan jasa kepada masyarakat bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini berharap kepada pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang *good governance*. Terselenggaranya *good governance* yang bersih, berwibawa, dan yang baik merupakan cita-cita dan harapan seluruh masyarakat. Penerapan prinsip *good governance* merupakan suatu sangat penting yang tujuannya untuk melakukan pelayanan publik agar kinerja aparaturnya Negara meningkat. Masyarakat sudah paham dan mengerti mengenai *good governance* yaitu pemerintahan yang baik, dan dilaksanakan oleh pemerintah desa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Hal yang sama dikatakan kasi pelayanan dalam wawancara yang mengatakan:

“Kita di desa itu ada namanya istilah RKP (rencana kerja pemerintah) melalui disitu kita membahas bentuk-bentuk perencanaan yang akan kita jalankan apakah ditahun yang berjalan atau ditahun berikutnya disitulah muncul diskusi baik di masyarakat apa yang menjadi kesepakatan sebentar maka itulah yang kita terapkan di desa. Dalam hal bentuk kotak saran untuk saat ini belum ada cuman kami tetap memasang poster layanan-layanan pengaduan yang dilengkapi dengan nomor whatsapp ketika ada keluhan masyarakat ada pengaduannya bisa dikonfirmasi langsung melalui pemerintah desa dan itu waktu pelayanannya 1 x 24 jam. Pembangunan dan rencana pelayanan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena yang kita lakukan tentu menjadi acuannya adalah hasil musyawarah yang dibahas pada saat penyusunan RKP. Ketika ada pengaduan contoh kasus tanah kita itu di desa diperhadapkan dengan satu kasus yaitu kasus tanah hal-hal yang begitu tentu kita tidak begitu langsung ada pengaduan yang masuk begitu langsung kita respon tetapi kita langsung melakukan pengkajian-pengkajian ketika persoalan kasus

ini tidak mampu diselesaikan pada saat itu juga tentu kami melibatkan beberapa tokoh dan meminta data-data yang terkait pada masalah-masalah yang menjadi titik pengaduan. Penyelesaian pengaduannya kami tergantung daripada penyelesaian pokok materi yang menjadi masalah”.

Observasi didapatkan bahwa benar tidak ada kotak saran tapi untuk pengaduan masyarakat dapat menghubungi no. whatsapp layanan pengaduan.

Selanjutnya menurut salah satu masyarakat Dusun Sahoddi dalam wawancara mengatakan:

“Baik dan memuaskan karena setiap ada pengurusan selalu dilayani dengan baik dan tidak ada keluhan hanya saja terkadang ingin mengurus sesuatu perangkat desa yang dibutuhkan tidak ada di kantor. Untuk sekarang ini tidak ada tetapi apabila ada pengaduan bisa langsung menghubungi perangkat desa yang bersangkutan. Respon pemerintah desa sangat baik karena menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada jangka waktu yang pasti namun upaya pemerintah desa untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat secepat mungkin harus jadi prioritas”.

Pemaparan masyarakat diatas menjelaskan bahwa kemampuan perangkat desa baik dan memuaskan karena setiap ada pengurusan di Kantor Desa Lamatti Riattang selalu dilayani dengan baik dan ada keluhan ketika ingin mengurus sesuatu perangkat desa yang dibutuhkan tidak ada di kantor. Untuk sekarang apabila ada pengaduan bisa langsung menghubungi perangkat desa yang bersangkutan. Respon pemerintah desa sangat baik karena menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada jangka waktu yang pasti namun upaya pemerintah desa untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat secepat mungkin menjadi prioritas perangkat desa.

Hal yang sama dikatakan oleh salah satu warga Dusun Saharu dalam wawancara yang mengatakan:

“Setiap ada pengurusan selalu dilayani dengan baik dan tidak ada keluhan hanya saja terkadang ketika mengurus perangkat desa yang dibutuhkan tidak ada di kantor. Sekarang ini kalau mau pengaduan langsung menghubungi whatsapp pengaduan atau bisa langsung menghubungi perangkat desa yang bersangkutan. Respon pemerintah desa sangat baik karena menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan tidak ada jangka waktu yang pasti namun upaya pemerintah desa untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat secepat mungkin”.

Pemaparan masyarakat diatas menjelaskan bahwa kinerja pemerintah desa baik dan memuaskan karena setiap ada pengurusan selalu dilayani dengan baik dan ada keluhan hanya saja terkadang ingin mengurus sesuatu perangkat desa yang dibutuhkan tidak ada di kantor. Untuk sekarang ini tidak ada tetapi apabila ada pengaduan bisa langsung menghubungi perangkat desa yang bersangkutan atau no whatsapp layanan pengaduan. Respon pemerintah desa sangat baik karena menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada jangka waktu yang pasti namun upaya pemerintah desa untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat secepat mungkin harus jadi prioritas.

Khairul Insan¹, Sri Rahayu Juniati², Syamsiah Hasyim³ & Nursyafika⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait penerapan *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di Kantor Desa Lamatti Riattang dengan indikator tanggung jawab disimpulkan bahwa sudah berjalan baik karena kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memberikan layanan sudah terlaksana dimana penerapan transparansi pemerintah dengan membuat sebuah kebijakan maupun didalam hal mengelolah sebuah anggaran pemerintah desa pada prinsipnya mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada, yang kedua semua perangkat desa atau pengelola yang ada dikantor desa diberikan kewenangannya masing- masing dalam mengolah kewenangannya dan menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing dan mengacu pada SOP. Hanya saja belum ada kotak saran dan pengaduan masyarakat tapi apabila ada pengaduan bisa langsung menghubungi perangkat desa yang bersangkutan atau no. whatsapp layanan pengaduan. Respon pemerintah desa sangat baik karena menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada jangka waktu yang pasti namun upaya pemerintah desa untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat secepat mungkin harus jadi prioritas.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan keberhasilan pembangunan Masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama untuk merealisasikan program pemerintah desa dengan cara meningkatkan taraf hidup ekonomi, kemandirian serta partisipasi masyarakat demi mewujudkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Observasi didapatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat baik karena setiap ada kegiatan masyarakat dilibatkan karena apabila ada suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masyarakat cukup antusias membantu apabila ada panggilan oleh kepala desa sehingga keberhasilan dalam pembangunan antara masyarakat dan pemerintah desa terjalin kerjasama dalam merealisasikan program pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi dan mewujudkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Bapak Kepala Desa Lamatti Riattang dalam wawancara mengatakan:

“Kita biasa lakukan di akhir tahun ada namanya dokumen keterangan pertanggungjawaban kepala desa jadi disitu waktunya kita mengevaluasi kegiatan yang pernah kita lakukan begitu juga masyarakat pada saat itu dikasi aduan untuk mengevaluasi langsung. Itu sudah pasti karena tanpa dukungan masyarakat program kita yang mau dilaksanakan di setiap dusun tidak bisa berjalan dengan baik itu artinya karena disaat kita musyawarah apapun itu bentuknya itu kita selalu di pemerintah desa selalu melakukan edukasi-edukasi terkait pentingnya apakah itu baik disegi pemeliharaan pembangunan baik itu ada potensi lokal yang ada di setiap dusun yang layak untuk kita kembangkan maka kita minta semua perwakilannya di setiap dusun untuk meminta masukan yang jelas intinya bagaimana kita membuat suatu konsep perencanaan yang ada di desa lamatti riattang dan tujuannya untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk pembinaan kemasyarakatan selain itu ada juga pembangunan fisik”.

Pemaparan kepala desa diatas menjelaskan bahwa tingkat pencapaian tujuan dalam pembangunan dilihat dari akhir tahun dokumen keterangan pertanggungjawaban kepala desa jadi disitu waktunya mengevaluasi kegiatan yang pernah pemerintah desa lakukan begitu juga masyarakat pada saat itu dikasi aduan untuk mengevaluasi langsung. Sudah pasti karena tanpa dukungan masyarakat program yang mau dilaksanakan di setiap dusun tidak bisa berjalan dengan baik artinya karena disaat musyawarah apapun itu bentuknya pemerintah desa selalu melakukan edukasi-edukasi terkait disegi pemeliharaan pembangunan baik itu ada potensi lokal yang ada di setiap dusun yang layak untuk dikembangkan maka diminta semua perwakilannya di setiap dusun untuk meminta masukan yang jelas intinya bagaimana membuat suatu konsep perencanaan yang ada di desa lamatti riattang dan tujuannya untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk pembinaan kemasyarakatan selain itu ada juga pembangunan-pembangunan fisik.

Menurut salah satu masyarakat Dusun Barang I dalam wawancara mengatakan:

“Tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan di Desa Lamatti Riattang cukup bagus sehingga masyarakat desa lamatti riattang puas adanya dana pembangunan yang ada di desa lamatti riattang sehingga masyarakat merasa puas baik dalam bentuk pembangunan maupun pelayanan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat dilibatkan karena apabila ada suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masyarakat cukup antusias membantu apabila ada panggilan oleh kepala desa”.

Pemaparan masyarakat diatas menjelaskan bahwa tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan di Desa Lamatti Riattang cukup bagus sehingga masyarakat desa lamatti riattang puas adanya dana pembangunan yang ada di desa lamatti riattang sehingga masyarakat merasa puas baik dalam bentuk pembangunan maupun pelayanan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat dilibatkan karena apabila ada suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masyarakat cukup antusias membantu apabila ada panggilan oleh kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait penerapan *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di Kantor Desa Lamatti Riattang dengan indikator efektivitas disimpulkan bahwa sudah efektif karena dilihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan dokumen keterangan pertanggungjawaban kepala desa mengevaluasi kegiatan yang pernah dilakukan dan masyarakat pada saat dikasi aduan untuk mengevaluasi langsung dan semua pelaksanaan program terlaksana dengan baik karena dukungan masyarakat dalam setiap kegiatan sangat dilibatkan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat cukup antusias membantu apabila ada panggilan oleh kepala desa.

3. Keberhasilan Pembangunan

Masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama untuk merealisasikan program pemerintah desa dengan cara meningkatkan taraf hidup ekonomi, kemandirian serta partisipasi masyarakat demi mewujudkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.

Khairul Insan¹, Sri Rahayu Juniati², Syamsiah Hasyim³ & Nursyafika⁴

Menurut Bapak Kepala Desa Lamatti Riattang dalam wawancara mengatakan:

“Baru-baru ini ada sebuah inovasi yang kami kembangkan di desa lamatti riattang yang bernama pengelolaan bank sampah yang sementara kami jalankan ini bertujuan bagaimana supaya kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang selama ini terbuang begitu saja saatnya kita harus pahami bahwa sampah mempunyai nilai ekonomis selain itu tujuan kami bagaimana lamatti riattang tahun ini untuk menjadi desa bebas sampah. Tidak terlepas dari keterlibatannya semua pihak itu akan dibahas melalui sebuah musyawarah dan hasil musyawarah itulah ditetapkan dalam sebuah regulasi atau peraturan desa dan itulah menjadi acuan kami dipelaksanaan aktivitas semua kegiatan-kegiatan yang ada di desa lamatti riattang. Kami tahun ini akan mencoba melakukan evaluasi sekaligus rencana memberikan sebuah penghargaan kepada perangkat desa yang memang dia memiliki kinerja yang baik. Untuk saat ini tidak ada kendala karena sejauh ini berjalan dengan baik”.

Pemaparan kepala desa diatas menjelaskan bahwa sebuah inovasi yang baru-baru dikembangkan di desa lamatti riattang yang bernama pengelolaan bank sampah dan sementara dijalankan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang selama ini terbuang begitu saja mempunyai nilai ekonomis selain itu tujuan pemerintah desa bagaimana lamatti riattang tahun ini untuk menjadi desa bebas sampah. Tidak terlepas dari keterlibatannya semua pihak itu akan dibahas melalui sebuah musyawarah dan hasil musyawarah itulah ditetapkan dalam sebuah regulasi atau peraturan desa dan itulah menjadi acuan kami dipelaksanaan aktivitas semua kegiatan-kegiatan yang ada di desa lamatti riattang. Pemerintah desa tahun ini akan mencoba melakukan evaluasi sekaligus rencana memberikan sebuah penghargaan kepada perangkat desa yang memiliki kinerja yang baik dan saat ini tidak ada kendala karena sejauh ini berjalan dengan baik.

Hal yang sama dikatakan oleh kasi pelayanan dalam yang mengatakan:

“Pemerintah Desa Lamatti Riattang selalu berusaha melakukan inovasi dimana baru-baru ini dijalankan pengelolaan bank sampah yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang selama ini terbuang mempunyai nilai ekonomis sehingga tujuan kami bagaimana lamatti riattang tahun ini untuk menjadi desa bebas sampah dan semua ini tidak terlepas dari keterlibatannya semua lapisan masyarakat dan tahun ini pemerintah desa akan mencoba melakukan evaluasi dengan memberikan sebuah penghargaan kepada perangkat desa yang memiliki kinerja yang baik sebagai motivasi kepada perangkat desa yang lain untuk bekerja lebih baik lagi dan selama ini tidak ada kendala karena berjalan dengan baik”.

Pemaparan kasi pelayanan diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Lamatti Riattang selalu berusaha melakukan inovasi seperti baru-baru ini dijalankan pengelolaan bank sampah yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang selama ini terbuang mempunyai nilai ekonomis sehingga tujuan pemerintah desa bagaimana Desa lamatti riattang tahun ini untuk menjadi desa bebas sampah dan semua ini tidak terlepas dari keterlibatannya semua lapisan masyarakat dan tahun ini pemerintah desa akan mencoba melakukan evaluasi dengan memberikan sebuah penghargaan kepada perangkat desa yang memiliki kinerja yang baik

sebagai motivasi kepada perangkat desa yang lain untuk bekerja lebih baik lagi dan selama ini tidak ada kendala karena berjalan dengan baik.

Adapun struktur organisasi bank sampah dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Pengurus Bank Sampah Lamatti Riattang

Selanjutnya daftar rencana pembangunan tahun 2021 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Daftar Rencana Pembangunan Tahun 2021 s/d 2023 Desa Lamatti Riattang

No.	Tahun	Pembangunan
1.	2021	Lanjutan Peningkatan jalan Kobae Dusun Sahoddi Pembangunan Talud
2.	2022	Pembangunan Jembatan Dusun Barang II Pemeliharaan Jalan Bulu Ase Dusun Sahoddi
3.	2023	Pembangunan Talud Jl. Attakkae Dusun Barang II Pembangunan Talud Jl. Teko Barang I Rabat Beton Mattirowalie Rabat Beton Bulu Mattuma Rabat Beton Jl. Samaenre Sumur Bor

Senada dengan diatas yang dikatakan oleh kasi pemerintahan dalam wawancara yang mengatakan:

“Program pemerintah desa ada tiga yaitu pemeliharaan rabat beton tuntas, pkk lamatti riattang adakan pembinaan administrasi dasawisma tahun anggaran 2022, dan lamatti riattang adakan pembukaan pesta seni dan olahraga tingkat dusun dalam rangka memperingati HUT RI dan selama ini tidak ada kendala karena berjalan dengan baik”.

Observasi didapatkan bahwa benar keberhasilan pembangunan Desa Lamatti Riattang sudah bagus karena banyak program pemerintah desa yang telah dilaksanakan seperti pemeliharaan rabat beton tuntas, pkk lamatti riattang adakan pembinaan administrasi dasawisma tahun anggaran 2022 dan lamatti riattang adakan pembukaan pesta seni dan olahraga tingkat dusun dalam rangka memperingati HUT RI.

Khairul Insan¹, Sri Rahayu Juniati², Syamsiah Hasyim³ & Nursyafika⁴

Selanjutnya menurut salah satu masyarakat Dusun Barang II dalam wawancara mengatakan:

“Sejauh ini program pemerintah desa yang saya ketahui hanya ada tiga yaitu pemeliharaan rabat beton tuntas, pkk lamatti riattang adakan pembinaan administrasi dasawisma tahun anggaran 2022, dan lamatti riattang adakan pembukaan pesta seni dan olahraga tingkat dusun dalam rangka memperingati HUT RI”.

Hal yang sama dikatakan oleh salah satu warga Dusun Barang I dalam wawancara yang mengatakan:

“Program pemerintah desa sudah berjalan baik karena telah dilakukan pemeliharaan rabat beton tuntas, pkk lamatti riattang adakan pembinaan administrasi dasawisma tahun anggaran 2022, dan selalu Desa lamatti riattang adakan pembukaan pesta seni dan olahraga tingkat dusun dalam rangka memperingati HUT RI. Tentu bagi saya pemerintah desa lamatti riattang telah menerapkan prinsip good governance dilihat dan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan consensus antara pemerintah dan warga bagi saya pemerintahan yang akuntabel merupakan harapan semua orang dan itu dilakukan oleh pemerintah desa lamatti riattang saat ini”. Pemaparan masyarakat diatas menjelaskan bahwa Program pemerintah desa sudah berjalan baik karena telah dilakukan pemeliharaan rabat beton tuntas, pkk lamatti riattang adakan pembinaan administrasi dasawisma, dan selalu Desa lamatti riattang adakan pembukaan pesta seni dan olahraga tingkat dusun dalam rangka memperingati HUT RI. Tentu bagi saya pemerintah desa lamatti riattang telah menerapkan prinsip *good governance* dilihat dan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan consensus antara pemerintah dan warga bagi saya pemerintahan yang akuntabel merupakan harapan semua orang dan itu dilakukan oleh pemerintah desa lamatti riattang saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait penerapan *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di Kantor Desa Lamatti Riattang dengan indikator keberhasilan pembangunan disimpulkan bahwa program pemerintah desa sudah berjalan baik karena telah dilakukan pemeliharaan rabat beton tuntas, pkk lamatti riattang adakan pembinaan administrasi dasawisma tahun anggaran 2022, dan selalu Desa lamatti riattang adakan pembukaan pesta seni dan olahraga tingkat dusun dalam rangka memperingati HUT RI dan baru-baru dikembangkan di desa lamatti riattang yang bernama pengelolaan bank sampah dan sementara dijalankan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang selama ini terbuang begitu saja mempunyai nilai ekonomis selain itu tujuan pemerintah desa bagaimana lamatti riattang tahun ini untuk menjadi desa bebas sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan penerapan *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di Kantor Desa Lamatti Riattang didapatkan bahwa: *Responsibilitas* sudah berjalan karena penerapan *transparansi* pemerintah dengan membuat sebuah kebijakan maupun didalam hal mengelolah sebuah anggaran pemerintah desa pada prinsipnya mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada, semua perangkat desa dikantor desa diberikan kewenangannya masing- masing

dalam mengolah kewenangannya dan menjalankan tupoksi masing- masing yang mengacu pada SOP. Belum ada kotak saran dan pengaduan masyarakat bisa langsung menghubungi no whatsapp layanan pengaduan. Efektivitas dilihat dari adanya dokumen keterangan pertanggungjawaban kepala desa mengevaluasi kegiatan dan semua pelaksanaan program terlaksana dengan baik karena dukungan masyarakat dan setiap ada kegiatan sangat dilibatkan masyarakat karena apabila ada suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masyarakat cukup antusias membantu. Keberhasilan pembangunan dari program pemerintah desa sudah berjalan karena telah dilakukan pemeliharaan rabat beton tuntas, pkk lamatti riattang adakan pembinaan administrasi dasawisma, dan selalu diadakan pesta seni dan olahraga tingkat dusun dalam rangka memperingati HUT RI dan baru-baru dikembangkan pengelolaan bank sampah yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah mempunyai nilai ekonomis selain itu tujuan pemerintah desa bagaimana lamatti riattang tahun ini untuk menjadi desa bebas sampah.

REFERENCES

- Arifin, Z. . (2021). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 12(2), 145–159. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.332>
- Arnida, Zulkifli Arifin, Nor Syahira, & Mohd. Raswan. (2024). BUMDES IMPROVEMENT STRATEGY IN THE COMMUNITY ECONOMY IN LAMATTI RIATTANG VILLAGE. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 15(2), 185–199. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i2.592>
- Daraba, D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di kabupaten takalar. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 1–8.
- Duadji, N. (2013). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR*, 28(2), 201–209.
- Irfani, K., Naziyah, F. A., & Widiyarta, A. (2021). MODEL ANALISIS SWOT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DPMPTSP PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(April).
- Iza, I. N., Habibi, M. M., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(4), 88–99.
- Nisa, M., Arifin, Z. ., & Pasrah , A. . (2024). ANALYSIS OF THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN IMPROVING THE ECONOMY OF THE BONGKI LENGKESE VILLAGE COMMUNITY. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 15(1), 96–104. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i1.590>
- Setiawan, G. (2024). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka.
- Silalahi, U. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algesindo.
- Tompo, M., & Madani, M. (2021). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RSUD LANTO DAENG PASEWANG. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(22), 43–52.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada.